

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Anonim, 2010). Sejalan dengan definisi tersebut, maka tujuan pendidikan yang diselenggarakan harus mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Dalam hal teknis penyelenggaraan dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya adalah demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (Anonim, 2003).

Menurut Ihsan (2010: 115), pendidikan nasional mempunyai tujuan yang jelas, seperti yang dicantumkan pada undang-undang pendidikan nasional. Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti

lulus, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dengan daya akal pikirannya, manusia mulai menentukan konsep pendidikan dengan menentukan tujuan dan sasaran, untuk selanjutnya mengatur dan menyusun perencanaan, langkah-langkah kebijakan, dan sebagainya sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan itu. Dari sini mulai dilakukan perubahan metode dan teknik mendidik (Suhartono, 2009: 41-42). Pendek kata, manusia yang terlibat secara teknis dan pemerintah harus menentukan pengelolaan pendidikan secara tepat.

Pengelolaan pendidikan diterapkan guna mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut Sobri (2009: 2), pengelolaan pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang.

Selain faktor pengelolaan, peran dari kurikulum juga sangat penting dalam praktiknya. Menurut Yamin (2009: 13), pendidikan bisa dijalankan dengan baik ketika kurikulum menjadi penyangga utama dalam proses belajar mengajar. Kurikulum mengandung sekian banyak unsur konstruktif supaya pembelajaran terlaksana dengan optimal. Sesuai dengan

pernyataan tersebut, maka kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan harus benar-benar mampu mengaplikasikan kurikulum tersebut.

Sekolah merupakan lembaga sosial yang keberadaannya merupakan bagian dari sistem sosial negara bangsa (Soedijarto, 2008: 117). Dengan demikian peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia susila yang cakap, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertakwa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian yang mantap dan mandiri dan lain sebagainya.

Menurut Hasbullah (2006: 109), "sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah semestinya mempunyai organisasi yang baik agar tujuan pendidikan dapat tercapai sepenuhnya". Salah satu ciri organisasi sekolah yang baik adalah pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuannya secara merata dengan baik, sesuai dengan kemampuan, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan.

Menurut Barizi (2009: 68), "lembaga-lembaga pendidikan yang efektif adalah lembaga yang mampu mencetak dari *raw input* menjadi *output* yang berkualitas". Hal ini berarti merujuk pada proses pendidikan berjalan dengan efektif. Kemampuan melakukan transformasi inilah yang seharusnya menjadi ukuran efektif atau tidaknya proses pembelajaran. Apabila suatu sekolah menerima *input* yang meliputi siswa, guru, fisik, dan fasilitas yang biasa, akan tetapi *output* dan *outcome*-nya ternyata tidak

kalah, baik akademik dan non-akademik, maka kepemimpinan di sekolah itu merupakan kepemimpinan yang efektif. Demikian pula sebaliknya dimana *input* yang diterima tergolong biasa, namun dengan efektivitas proses pendidikan akan mampu mendapat *output* yang berkualitas.

Hal ini sejalan dengan pendapat Arcaro (2007: 2) bahwa pendidikan harus mengubah paradigmanya. Mutu pendidikan akan meningkat bila administrator, guru, staf dan anggota dewan sekolah mengembangkan sikap baru yang terfokus pada kepemimpinan, kerja tim, kooperasi, akuntabilitas dan pengakuan. Dengan demikian kebutuhan terhadap kurikulum yang mantap, kebijakan yang jelas dan fasilitas yang memadai serta organisasi yang terstruktur merupakan sebuah kemutlakan.

Menurut Munir (2008: 29), “suatu kelompok/lembaga pasti akan diarahkan atau disamakan persepsi-persepsi atau tujuan-tujuannya oleh oleh seseorang yang dipilih oleh komunitas internal atau eksternal untuk menjadi ketua atau pemimpin”. Ini semua dimaksudkan agar hal-hal yang akan dilakukan oleh kelompok atau lembaga tersebut menjadi lebih terarah, fokus, dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam lembaga pendidikan seperti sekolah, kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan kinerja guru karena tipe kepemimpinan kepala sekolah juga berpengaruh kepada guru sebagai tenaga edukatif, maupun aktivitas-aktivitas lainnya.

Menurut Purwanto (2006: 26), “kepemimpinan adalah . . .

“suatu kepribadian (*personality*) seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang-orang untuk mencontohnya atau

mengikutinya, atau yang memancarkan suatu pengaruh yang tertentu, suatu kekuatan atau wibawa, yang demikian rupa sehingga membuat sekelompok orang mau melakukan apa yang dikehendakinya”.

Dengan demikian seorang pemimpin memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung dengan kemampuan yang dimilikinya. Ia dapat mencontohkan perilaku tertentu dalam mencapai tujuan maupun menggunakan kekuatan yang melekat pada status sebagai pemimpin.

Lembaga pendidikan membutuhkan seorang pemimpin. Sebab, pemimpin itulah sosok penggerak dan inspirator dalam merancang dan mengerjakan kegiatan. Seorang pemimpin seyogyanya tidak hanya menggunakan aturan tertulis, tapi juga sikap perilaku, sikap terjang, dan keteladanan dalam melakukan agenda transformasi ke arah yang lebih baik. Menurut Asmani (2009: 91), ”pemimpin tidak hanya seorang manajer, ia juga harus seorang pembangun mental, moral, spirit dan kolektivitas kepada jajaran bawahannya”.

Kepemimpinan tersebut dalam lembaga pendidikan merujuk pada kepala sekolah. Perilaku kepala sekolah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan menunjukkan rasa bersahabat, dekat dan penuh pertimbangan terhadap para guru, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Menurut Mulyono (2009: 143-144), ”kepala sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif”. Kepala sekolah yang dapat memimpin warganya akan mampu menciptakan situasi kondusif sehingga prestasi sekolah dapat meningkat semakin baik.

Wahjosumidjo (2002: 32) mendefinisikan kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah (sekolah) tempat diselenggarakannya tempat belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Sesuai dengan definisi tersebut, maka dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, kepala sekolah harus menjalin hubungan dengan warga sekolah lainnya, berupa hubungan formal maupun hubungan informal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik jika ada komunikasi antara kepala sekolah dengan warga sekolah.

Dalam organisasi sekolah, peran kepala sekolah sangat penting. Menurut Rohiat (2008: 33), “kepala sekolah mempunyai posisi puncak yang memegang kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan”. Sesuai dengan pernyataan tersebut, secara sederhana dapat dinilai bahwa keberhasilan dan kegagalan sekolah tersebut dalam mencapai tujuan berada pada pundak kepala sekolah dalam memimpin lembaga pendidikan tersebut. Pendek kata, kepemimpinan kepala sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan.

Pemimpin pendidikan harus menyadari bahwa kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab yang ada padanya sebagian harus didelegasikan dan dipencarkan kepada staf yang lain, yang mampu untuk menerima dan melaksanakan pendelegasian dan pemencaran kekuasaan tersebut. Menurut Indrafachrudi (2006: 12), pendelegasian dan

pemencaran ini dilakukan supaya proses kerja lembaga secara keseluruhan berjalan lancar, efisien dan efektif.

Pemimpin pendidikan memegang kunci penting dalam membangun dan memelihara hubungan-hubungan dengan orang lain. Hubungan-hubungan ini tergantung pada kualitasnya dapat membantu organisasi bergerak mencapai cita-citanya atau bahkan dapat menghalangi kemajuannya. Menurut Kholis (2009: 115), lembaga-lembaga pendidikan yang efektif (berhasil) memerhatikan baik tugas-tugas akademik maupun kebutuhan-kebutuhan manusia, staf dan siswa.

Dalam upaya mencapai tujuan sekolah tersebut, seorang kepala sekolah harus mempunyai sejumlah kompetensi. Bafadal (dalam um.ac.id/news/2008/12/87/) menyebutkan lima kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah, yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Oleh karena itu, kepala sekolah sekarang harus memiliki profesionalisme. Kepemimpinan dan manajemen kepala sekolah akan berpengaruh kepada produktivitas sekolah, budaya organisasi dan kualitas kinerja guru.

Menurut Danim (2009: 35-36), prestasi kepala sekolah hanya akan dicapai melalui kerja keras dari orang yang memiliki kemampuan, dorongan, keinginan untuk sukses dari usaha nyata. Motivasi kompetensi dan motivasi berprestasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena kedua motivasi ini sama-sama mengharapkan hasil kerja yang baik dan berkualitas tinggi.

Dalam hal kepemimpinan pendidikan, secara sederhana dapat ditunjuk bahwa kepala sekolah adalah sosok yang seringkali tampil dominan. Hasil penelitian Bush (2008: 100-101) tentang kepala sekolah perempuan dan manajer perempuan senior yang mengindikasikan bahwa mereka cenderung berperilaku model manajemen transformatif dan partisipatif. Buktinya adalah 85% kepala sekolah di Inggris dan Wales menganggap dirinya memiliki model manajemen kolaboratif dan *people-centered*. Di Amerika Serikat, Inggris Raya, Australia dan Selandia Baru, para manajer perempuan tampil bekerja secara kooperatif dan memberdayakan koleganya serta memfungsikan *team work* secara efektif.

Dalam praktiknya, kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah tersebut juga berimbas dengan masyarakat. Secara umum, hubungan sekolah dengan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya, hubungan tersebut sering kali terkendala. Secara internal, kepala sekolah sudah disibukan dengan kegiatan pembelajaran dan aktivitas kedinasan lainnya. Sebaliknya masyarakat cenderung mengabaikan kerja sama dan koordinasi dengan sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan, seolah-olah tidak mempunyai tanggung jawab.

Kepala sekolah selaku pemimpin mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan kegiatan pembelajaran di sekolah yang ia pimpin. Di SD Negeri Kunden 1, Blora, Kepala Sekolah yang juga aktif sebagai guru berupaya untuk dapat

menjalankan kedua fungsi tersebut, baik sebagai pemimpin sekolah maupun sebagai penanggung jawab kegiatan pembelajaran sesuai dengan pelajaran yang diampu. Suhartono (2009: 117) menyebutkan bahwa struktur dalam organisasi sekolah terdiri atas empat bagian. Pertama, berbentuk hubungan vertikal intern sekolah yang mencakup hubungan diantara unsur-unsur, yaitu kepala sekolah, guru dan siswa. Kedua, berbentuk vertikal ekstern sekolah yang mencakup hubungan fungsional sekolah dengan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Pendidikan Nasional. Ketiga, hubungan horizontal intern, yaitu hubungan antara guru, antar staf tata usaha, dan antar peserta didik. Keempat, bentuk hubungan horizontal ekstern, yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat, antara sekolah dengan orang tua peserta didik, dan sekolah dengan Pemerintah Daerah setempat.

Begitu pula dengan suasana selama kegiatan pembelajaran. Sarana pembelajaran harus dikembangkan agar dapat menunjang proses belajar mengajar. Yamin (2008: 105-106) menyebutkan beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam menunjang proses belajar mengajar antara lain adalah 1) perpustakaan, 2) sarana penunjang kegiatan kurikulum, dan 3) prasarana dan sarana kegiatan ekstrakurikuler dan mulok.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan

kepemimpinan kepala sekolah di SD Negeri Kunden 1, Blora dalam format penelitian tesis.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimanakah karakteristik kepemimpinan kepala sekolah berbasis mutu pembelajaran di SD Negeri Kunden 1, Blora. Selanjutnya dari fokus penelitian tersebut, peneliti membagi menjadi tiga subfokus pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik aktivitas hubungan kerja Kepala Sekolah dengan guru di SD Negeri Kunden 1, Blora?
2. Bagaimanakah karakteristik siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di SD Negeri Kunden 1, Blora?
3. Bagaimanakah karakteristik sarana dan prasarana pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di SD Negeri Kunden 1, Blora?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik kepemimpinan kepala sekolah. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini sesuai dengan subfokus penelitian, yaitu

1. Mendeskripsikan karakteristik aktivitas hubungan kerja Kepala Sekolah dengan guru di SD Negeri Kunden 1, Blora.

2. Mendeskripsikan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di SD Negeri Kunden 1, Blora.
3. Mendeskripsikan karakteristik sarana dan prasarana pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di SD Negeri Kunden 1, Blora.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat. Secara praktis hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat secara langsung bagi:

1. Kepala Sekolah dapat mengembangkan hubungan kerja secara internal dan eksternal secara efektif dan efisien sesuai dengan peran sebagai pemimpin sehingga diperoleh kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan pendidikan
2. Guru dapat mendukung kinerja kepala sekolah maupun rekan kerja lainnya dengan kerja sama dan koordinasi yang kompak.
3. Siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara aktif, belajar dan berlatih baik di sekolah maupun di rumah.
4. Sekolah dapat menyediakan, menggunakan dan melakukan perawatan terhadap fasilitas sekolah sehingga kegiatan pembelajaran menjadi aktif, efektif dan menarik.

E. Daftar Istilah

1. Kepala Sekolah adalah pemimpin pendidikan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang ia pimpin.
2. Guru adalah tenaga pendidik yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya.
3. Siswa adalah anggota masyarakat yang menjadi peserta didik untuk mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah.
4. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran.